

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



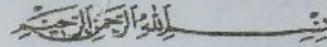
Oleh

**NAMA : WIDIYA
NPM : 1505170700
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : WIDIYA
N.P.M : 1505170700
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (C/B) Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Pengujian I

Pengujian II

FTI HANI SARAGIH, SE, M.Si

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak.

UMSU

Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : WIDIYA
NPM : 1505170700
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH , S.E., M.Si.

H. JANURI, SE., M.M., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak, M.Si

Nama Mahasiswa : WIDIYA
NPM : 1505170700
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : KEUANGAN
Judul Proposal : PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
26/02.19	BAB IV Tuliskan Gambaran umum perusahaan Buat Grafik dan Penjelasan pertajam pembahasan menjawab rumusan masalah Identifikasi masalah Sesuaikan dengan hasil wawancara cara		
01/03.19	BAB V Kesimpulan dan Saran		
02/03.19	Referensi menggunakan mendeley		
4/3.19	Ace. Sid. Muzlyza		

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak, M.Si

Medan, Maret 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

ABSTRAK

Widya (1505170700) Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar Pelaporan Akuntansi dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada pada Dinas Perhubungan Provsu. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui teknik pengambilan angket atau pengumpulan data penelitian dilaksanakan dari awal bulan Desember 2018 sampai dengan akhir bulan April 2019. Pengumpulan data menggunakan metode kuisioner yang didistribusikan oleh peneliti kepada responden secara langsung. Penerapan standar Pelaporan Akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Pengaruh penerapan standar Pelaporan Akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta akuntabilitas pemerintah yang lebih baik. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas. Tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen. Penerapan standar Pelaporan Akuntansi, Pengawasan kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik

Kata Kunci : Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teoritis	10
1. Akuntabilitas	10
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	17
3. Pengawasan laporan keuangan	20
4. Penelitian Terdahulu	25
B. Kerangka Konseptual	27
C. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Populasi Dan Sampel	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Analisis Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Anggaran Belanja.....	5
Tabel II.1	Review Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel III.1	Definisi Operasional	31
Tabel III.2	Waktu Penelitian.....	32
Tabel IV.1	Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	52
Tabel IV.2	Distribusi Responden Berdasarkan Kelamin	53
Tabel IV.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel IV.4	Tabulasi Jawaban Responden Standar Akuntansi Pemerintahan ..	54
Tabel IV.5	Tabulasi Jawaban Responden Pengawasan laporan keuangan	56
Tabel IV.6	Tabulasi Jawaban Responden Akuntabilitas	61
Tabel IV.7	Statistik Deskriptif	63
Tabel IV.8	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	56
Tabel IV.9	Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel IV.10	Coefficients	58
Tabel IV.11	ANOVA(b)	60
Tabel IV.12	Model Summary	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Konseptual	30
-------------	---------------------------	----

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerahNya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas perhubungan provinsi sumatera utara”** yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi dapat terselesaikan kepada Ayahanda **yusuf** dan Ibunda tercinta **Sukesih** yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak **H. Januri, SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si** selaku Pembimbing skripsi ini atas keluargan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Buat seluruh Keluarga dan teman yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Medan, Maret 2019
Penulis

WIDIYA
1505170700

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang akuntabilitas pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian akuntabilitas yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dikeluarkannya Undang – undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang – undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Undang – undang No. 32 tahun 2004 dan Undang – undang No. 33 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Penerapan anggaran berbasis akuntabilitas diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis akuntabilitas dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis akuntabilitas menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Slamet (2005:6) menyatakan: Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Menurut Slamet (2005: 6) Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak pada dua hal, yakni faktor sistem dan faktor orang. Sistem menyangkut aturan-aturan dan tradisi organisasi seperti dalam pembentukan sistem pengendalian internal, partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, merancang tujuan anggaran, budaya organisasi, komitmen organisasi. Sedangkan faktor orang menyangkut motivasi, persepsi dan nilai-nilai yang dianutnya yang mempengaruhi kemampuannya akuntabilitas.

Bagi kebanyakan pemerintah daerah permasalahan akuntabilitas aset nampak sangat rumit dan *complicated*, bahkan seolah tidak dapat terselesaikan, padahal sebenarnya penyelesaiannya bisa "sangat sederhana". Yang menjadi permasalahan adalah pemerintah daerah tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan anggaran dan belanja yang diakibatkan oleh anggaran belanja yang besar tetapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan dapat dikatakan gagal.

Pada penelitian ini peneliti hanya faktor sistem yang mempengaruhi akuntabilitas seperti standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan karena Dalam penilaian akuntabilitas, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek tertentu saja, melainkan meliputi berbagai aspek yang bersifat menyeluruh.

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan disajikan dalam tiga kategori, yaitu: opini, laporan hasil pemeriksaan SPI dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada semester 1 Tahun 2017, BPK melakukan pemeriksaan keuangan pada tahun 2016 pasal 537 LKPD Tahun 2016 dari 542 pemda yang wajib menyusun Laporan Keuangan Tahun 2016. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 375 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 139 LKPD dan opini Tidak

Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 LKPD (IHPS I, 2017:79).

Penyebab LKPD memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Hal tersebut disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun asset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen asset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (IHPS I, 2017:85).

Standar akuntansi pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan berlaku sebagai pedoman, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola. SKPD Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual di Kementerian perhubungan yang berlaku untuk seluruh satuan kerja kantor pusat, unit pelaksanaan teknis, unit akuntansi pada pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Belanja Subsidi untuk subsidi pangan/beras di kementerian sosial.

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana akuntabilitas pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama akuntabilitas instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Untuk Dinas Perhubungan Kota Medan, berdasarkan data APBD Tahun 2015-2017, secara keseluruhan

belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan akuntabilitas dan perbaikan akuntabilitas yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Anggaran Belanja Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Hasil Audit
1	2	3	4	
2013	29.871.885.000	31.694.879.407	106,10	WTP
2014	33.718.513.000	34.123.452.172	101,20	WTP
2015	33.927.131.900	35.389.569.200	104,31	WDP
2016	35.241.066.000	35.779.346.196	101,53	WDP
2017	35.771.237.500	41.713.048.894	116,61	WDP

Sumber : Dishub Provsu Tahun 2019

Berdasarkan tabel I.1 di atas bahwa realisasi belanja Dinas Perhubungan dari tahun 2013-2017 melebihi 100% sementara menurut Halim (2004:20) Analisis terhadap akuntabilitas belanja daerah di nilai baik apabila realisasi tidak mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Penilaian akuntabilitas anggaran belanja merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, Standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan (Nirzawan : 2011: 81).

Berdasarkan tabel I-1 terjadi peningkatan persentase realisasi anggaran belanja dari tahun 2015-2017 yang artinya penggunaan anggaran belanja yang tidak efisien penggunaannya serta tidak maksimalnya peranan anggaran dalam mekanisme pengendalian atas proses operasional. Sesuai teori yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:493) bahwa Analisis terhadap belanja daerah secara umum terlihat dari realisasi biaya dan anggarannya. Apabila realisasi anggaran belanja

daerah yang tidak melampaui anggaran (target) maka akuntabilitas dapat dinilai dengan baik”.

Dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Dinas Perhubungan Provsu tahun 2015-2017 bahwa opini yang diberikan berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Sumatera Utara, sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berupa prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis akuntabilitas terhadap akuntabilitas akuntabilitas instansi pemerintah. Bangun (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap akuntabilitas yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap akuntabilitas SKPD,

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul Pengaruh **Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.**

E. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas maka hal-hal yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Realisasi belanja Dinas Perhubungan pada tahun 2015-2017 melebihi 100%.
2. Hasil laporan audit BPK menyatakan laporan keuangan Dinas perhubungan dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan standar pelaporan akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Provsu?
2. Apakah pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Provsu?
3. Apakah penerapan standar pelaporan akuntansi dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Provsu?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Provsu.

- b) Untuk menguji dan menganalisis pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Provsu
- c) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada pada Dinas Perhubungan Provsu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

a) Bagi peneliti

Diharapkan dapat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

b) Bagi institusi

Diharapkan dapat memberi masukan bagi para penentu kebijakan di instansi Dinas Perhubungan Kota medan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dibutuhkan adanya keterlibatan dari manajemen bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Pelimpahan wewenang yang diberikan pada manajemen bawahan mempunyai hubungan erat dengan partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran mempunyai hubungan positif terhadap akuntabilitas manajerial hanya pada pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi.

c) Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penelitian yang akan datang mengenai penerapan standar akuntansi, karakteristik tujuan anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas manajerial.

BAB II

LANDASAN TEORI

B. Uraian Teoritis

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good government* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang di berikan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Salim (2007: 16) Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002 : 20) Pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertngghungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Ausaid (2001:6) Akuntabilitas merupakan instrumen yang menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan dan kesamaan hak dihadapan hukum telah dihargai atau tidak. Akuntabilitas adalah hal yang sangat penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas dari administrasi publik. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik.

Menurut Toha (2007: 34) akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Menurut Lenvine Dwiyanto (2005:147) mendefenisikan akuntabilitas adalah : Akuntabilitas sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan

yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat dan mengukur perinsip-prinsip pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan, dan kesamaan hak dihadapan hukum telah diimplementasikan dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

b. Pengukuran Akuntabilitas

Kumurotomo (2005: 15) indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) *Exemplary leadership*, dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus sensitif, responsif, akuntabel dan transparan kepada bawahan;
- 2) *Public Debate*, artinya sebelum kebijakan yang besar disahkan seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang maksimal;
- 3) *Coordination*, dimaksudkan bahwa koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas.
- 4) *Autonomy*, artinya instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi;
- 5) *Explicitness and clarity*, artinya standar karakteristik akuntabilitas harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan
- 6) *Legitimacy and acceptance*, tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat ditentukan dapat diterima oleh semua pihak;
- 7) *Negotiation*, maksudnya harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah;
- 8) *Educational campaign and publicity*, dimaksudkan perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut;
- 9) *Feed back and evaluation*, yaitu bahwa akuntabilitas harus tentu menerus ditingkatkan dan disempurnakan, maka perlu informasi sebagai umpan baik dari penerima akuntabilitas serta dilakukan karakteristik perbaikannya.
- 10) *Adaption and recycling*, yaitu perubahan yang terjadi dimasyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem

akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan Menurut Stephen P. Robbins dan Marry Coulter yang dialihbahasakan oleh T. Hermaya dan Harry Slamet (2004 :8) agar fungsi-fungsi manajemen berjalan sesuai harapan ada empat indikator akuntabilitas yang perlu dikarakteristik yaitu :

1. Kemampuan perencanaan
2. Kemampuan pengorganisasian
3. Kemampuan kepemimpinan
4. kemampuan pengendalian”.

Dari keempat faktor manajemen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Kemampuan Perencanaan

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, siapa yang harus melapor ke siapa, dan dimana keputusan harus dibuat.

2) Kemampuan pengorganisasian

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses memotivasi bawahan, mempengaruhi individu atau tim sewaktu mereka bekerja, memiliki saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan dengan berbagai cara masalah perilaku pegawai.

3) Kemampuan kepemimpinan

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses pemantauan akuntabilitas aktual, membandingkan actual dengan standar, dan membuat koreksinya jika perlu.

4) Kemampuan pengendalian

Yaitu kemampuan manajemen yang mencakup proses mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan.

c. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap. Kepercayaan publik yang tinggi akan dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintahan akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat.

Slamet (2005:6) menyatakan : Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas pemerintahan sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah menilai akuntabilitas pemerintahan dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Berkaitan dengan tujuan akuntabilitas yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan menurut Kemendiknas (2010:773) bahwa : Guna mengukur akuntabilitas mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil karakteristik harus dimasyarakatkan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Pemerintahan dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil akuntabilitas pemerintahan dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Slamet (2005:6) ada delapan hal yang harus dikerjakan pemerintahan untuk peningkatan akuntabilitas:

- 1) Pemerintahan harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
- 2) Pemerintahan perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
- 3) Pemerintahan menyusun rencana pengembangan pemerintahan dan menyampaikan kepada publik/stakeholders diawal setiap tahun anggaran.
- 4) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran akuntabilitas pemerintahan dan disampaikan kepada stakeholders.
- 5) Melakukan pengukuran pencapaian akuntabilitas pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders dia akhir tahun.
- 6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
- 7) Menyediakan informasi kegiatan pemerintahan kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
- 8) Memperbaharui rencana kerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas organisasi baik publik maupun swasta. Secara detail Ruky dalam Hessel Nogi (2005 : 180) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian akuntabilitas organisasi sebagai berikut :

- 1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi, semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi akuntabilitas organisasi tersebut.
- 2) Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi ;
- 3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan ;
- 4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan seperti dalam proses penyusunan anggaran dan penggunaan dana alokasi anggaran.
- 5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasi;
- 6) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

Menurut Atmosoeperto (2005: 181) mengemukakan bahwa akuntabilitas organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut

kedua faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a) Faktor eksternal, yang terdiri dari
 - 1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
 - 2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar.
 - 3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan akuntabilitas organisasi.
- b) Faktor internal, yang terdiri dari :
 - 1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi
 - 2) Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada
 - 3) Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
 - 4) Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah, yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan keuangan. (Halim, 2012:89).

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam pelaksanaannya diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan (BPK). Dengan penerapan SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa: “prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan disajikan.”

Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam PP 24/2005, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual

untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas telah diterima atau dibayar.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mewajibkan laporan keuangan tahun anggaran 2005 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang secara garis besar terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas serta Catatan atas laporan Keuangan, yang dikenal sebagai basis kas menuju akrual.

PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan sampai saat ini. Basis akuntansi yang digunakan dalam SAP ini adalah basis kas menuju akrual (cash toward accrual), dimana penggunaan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Komponen-komponen laporan keuangan dalam SAP (PP No. 24 tahun 2005) adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap

APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos seperti Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak dan Bukan Pajak, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, dan Ekuitas Dana.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar mukalaporan keuangan.
- 5) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 6) Daftar dan skedul.

3. Pengawasan laporan keuangan

a. Pengertian Pengawasan laporan keuangan

Pengawasan laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen (Kenis, 2009). Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, sikap dan akuntabilitas manajer. *Punitive approach* dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dan sikap yang negatif, sedangkan *supportive approach* dapat mengakibatkan sikap dan perilaku yang positif (Kurnia, 2004).

Arifin (2007:27) pengawasan laporan keuangan yang bersifat *punitive* dapat menyebabkan rendahnya motivasi, sebaliknya pengawasan laporan keuangan yang bersifat *supportive* dapat menghasilkan sikap dan tingkah laku positif.

Munawar (2006) menjelaskan pengawasan laporan keuangan adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab.

Menurut Ginting (2009:31), pengawasan laporan keuangan menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam pengawasan laporan keuangan akuntabilitas mereka

Munawar (2006) menemukan bahwa pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan pengawasan laporan keuangan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, namun pada saat pelaksanaan mereka tidak melakukan pengawasan laporan keuangan terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga membuat akuntabilitas mereka menjadi rendah.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan pengawasan laporan keuangan adalah pengawasan laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dan digunakan sebagai dasar penilaian akuntabilitas. Dimana apabila pengawasan laporan keuangan yang dilakukan bersifat punitive maka motivasi menjadi rendah, dan sebaliknya jika pengawasan laporan keuangan yang dilakukan bersifat supportive akan menghasilkan tingkah laku yang positif dan dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen.

b. Tujuan Pengawasan laporan keuangan

Pengawasan laporan keuangan secara mendasar mempunyai 4 tujuan yaitu 1) meyakinkan bahwa akuntabilitas yang sesungguhnya sesuai dengan akuntabilitas yang diharapkan, 2) memudahkan untuk membandingkan antara akuntabilitas individu satu dengan yang lainnya, 3) sistem pengawasan laporan keuangan akuntabilitas dapat memicu suatu isyarat tanda bahaya, memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi dan 4) untuk menilai pembuatan keputusan manajemen (Kurnia, 2004).

Menurut Wahab (2002: 51) tujuan dari pengawasan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan laporan keuangan memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai akuntabilitas kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini pengawasan laporan keuangan mengungkapkan seberapa jauh tujuantujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai
- b. Pengawasan laporan keuangan memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target
- c. Pengawasan laporan keuangan memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai akuntabilitas kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan

c. Fungsi Pengawasan laporan keuangan

Menurut Supriyono (2000:41) pengawasan laporan keuangan mempunyai beberapa macam fungsi antara lain untuk :

1) Fungsi Koordinasi

Pengawasan laporan keuangan berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada didalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan. Perlu diketahui bahwa koordinasi harus diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap individu didalam organisasi mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi. Proses untuk menyelaraskan hubungan antara pegawai dan pekerja mereka agar saling berhubungan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan membagi pekerjaan diantara kelompok, individu, dan mengkoordinasikan hubungan antara kegiatan individu dan kelompok.

2) Fungsi Komunikasi

Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui dan berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan, berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran. Selanjutnya, setiap orang yang bertanggungjawab terhadap anggaran harus dinilai mengenai prestasinya melalui laporan pengendalian produk.

3) Fungsi Motivasi

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana didalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi.

4) Fungsi Pengendalian

Pengawasan laporan keuangan dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah sudah menjadi "tanda bahaya" bagi organisasi atau unit-unitnya. Penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar pengawasan laporan keuangan atau penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang. Seringkali istilah perencanaan dan pengendalian disatukan dan seringkali kedua istilah tersebut digunakan untuk maksud yang sama, sistem anggaran yang baik harus dihubungkan dengan perencanaan dan pengendalian, perencanaan yang baik tanpa pengendalian yang efektif berakibat pemborosan dana dan waktu. Sebaliknya, tanpa perencanaan tidak dapat dilakukan pengendalian ke arah tujuan yang ingin dicapai.

5) Fungsi Pendidikan

Pengawasan laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat

pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, anggaran bermanfaat untuk latihan kepemimpinan bagi para manajer atau calon manajer agar dimasa depan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi.

4. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil	Sumber
1	Urip Santoso	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud	Akuntansi Sektor Publik Akuntabilitas Kinerja	Secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Sedangkan secara teoritis Penerapan Akuntansi Sektor Publik	Jurnal Administrasi Bisnis (2008), Vol.4, No.1: hal. 14-33
2	Nugraeni	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja	standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja	Hasilnya variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap	Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis (2010) Vol. 12 No. 1

				akuntabilitas kinerja. Sedang kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Terbentuk struktur baru dari analisis jalur yang didukung oleh bukti empirik.	
3	Hari Raditya Nugroho	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengawasan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2014)	penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan pengawasan, kualitas aparatur pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan	penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, terbukti dari nilai thitung sebesar 3,909 > t tabel (2,009), penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, terbukti dari nilai thitung sebesar 3,359 > t tabel (2,009) dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, terbukti dari nilai t hitung sebesar 6,054 > t tabel (2,009). Sehingga hipotesis H1 sampai H3 dapat diterima kebenarannya.	Study & Accounting Research Vol XI, No. 1 – 2014: 15-32.
4	Santha Julia Sardi	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi	Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh Kejelasan Sasaran Anggaran dan	Jurnal InFestasi Vol. 12, No.2, Desember 2016

		(Studi Empiris Pada Satker Balai Besar Bmkg Wilayah Iii Denpasar-Bali)	Pemerintah	Standar Akuntansi Pemerintahan	
5	Iin Novianti	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar	Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, efektivitas fungsi pengawasan, kinerja keuangan pemerintah daerah	Hasil penelitian memperlihatkan hubungan linier positif dan berhubungan cukup erat antara implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Aceh Besar	Jurnal Administrasi Bisnis (2008), Vol.4, No.1
6	Syamsidar	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja	standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja	Hasilnya variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja.	Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 12 No. 1 Maret 2015
7	Ruhinda Novitri	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, terbukti dari nilai t hitung sebesar 3,909 > t tabel (2,009) (p=0,000 < 0,05)	JOM FEK0.ON Vo. 1 No. 2 Oktober 2014

B. Kerangka Konseptual

Akuntabilitas manajerial adalah seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas merupakan penampilan hasil kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Akuntabilitas dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok. Akuntabilitas organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi akuntabilitas sejumlah individu dalam organisasi.

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi (determinan) akuntabilitas individu, perlu dilakukan pengkajian terhadap teori akuntabilitas. Secara umum faktor fisik dan non fisik sangat mempengaruhi. Berbagai kondisi lingkungan fisik sangat mempengaruhi kondisi dalam bekerja. Selain itu, kondisi lingkungan fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya faktor lingkungan non fisik. Pada kesempatan ini pembahasan di fokuskan pada lingkungan non-fisik, yaitu kondisi-kondisi yang sebenarnya sangat melekat dengan sistem manajerial perusahaan.

Salah satu alat pengendalian yang mempunyai ukuran-ukuran akuntansi adalah anggaran. Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasi. Anggaran sering digunakan untuk menilai akuntabilitas para manajer. Bonus, kenaikan gaji, dan promosi adalah semua hal yang dipengaruhi oleh kemampuan seorang manajer untuk mencapai atau melampaui tujuan yang direncanakan.

Anggaran merupakan salah satu komponen penting untuk menterjemahkan keseluruhan strategi ke dalam rencana dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dan juga berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan,

mengkomunikasikan, memotivasi dan karakteristik prestasi.

Partisipasi penyusunan anggaran meningkatkan identifikasi para pegawai tidak hanya dengan sasaran anggaran tapi juga dengan tujuan organisasi karena komitmen organisasi mencakup penerimaan dan kepercayaan akan nilai dan tujuan organisasi, maka penerapan standar akuntansi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

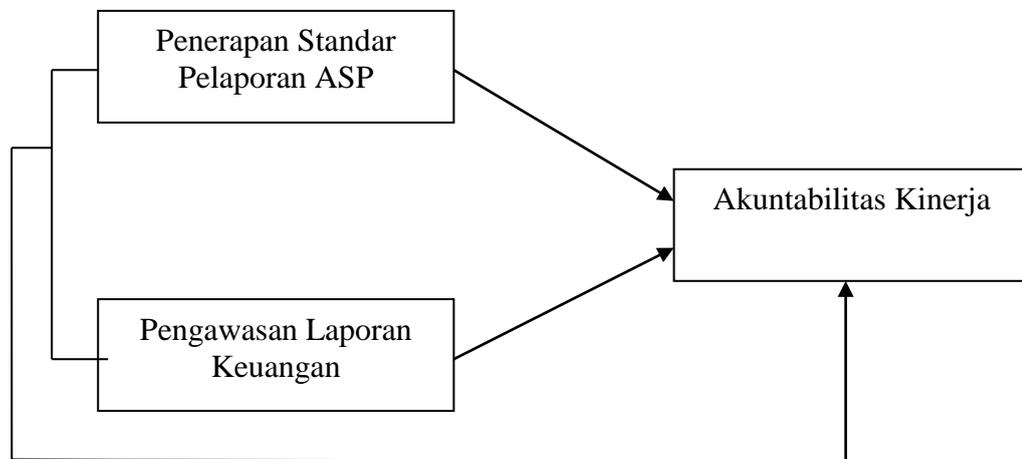
Pentingnya aspek pengawasan laporan keuangan diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil pengawasan laporan keuangan dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan. Hasil pengawasan laporan keuangan juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan agar dapat meningkatkan akuntabilitas.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas.

Kejelasan sasaran anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan dan digunakan dalam karakteristik akuntabilitas manajer Bagian Keuangan memberi reaksi yang tidak menguntungkan untuk menggunakan anggaran dalam karakteristik akuntabilitas dalam suatu gaya punitive (meningkatkan ketegangan kerja, menurunkan akuntabilitas anggaran). Kecenderungannya, secara jelas hubungan antara variabel lemah.

Pentingnya aspek kejelasan sasaran anggaran diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil karakteristik dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan. Hasil karakteristik juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan.

Dari penjelasan diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebahai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka konseptual, sesuai dengan tujuan dan masalah yang dikemukakan, maka pengajuan hipotesis sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Pelaporan ASP berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Provsu.
2. Pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Provsu
3. Penerapan Standar Pelaporan ASP dan Pengawasan laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pada BPKD Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Zuliandi dan Irfan (2013 : 14) bahwa pendekatan asosiatif adalah suatu pendekatan dimana untuk mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan atau mengetahui bahwa adanya hubungan atau pengaruh diantara kedua variabel (variable bebas dan variabel terikat)

H. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Jumlah Item Pertanyaan
Standar Pelaporan Keuangan ASP (X1) (Falikhatun ; 2007)	regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah, yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah	a. Basis Akuntansi b. Nilai Historis c. Realisasi d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal e. Periodisitas f. Konsistensi g. Pengungkapan Lengkap h. Penyajian Wajar	8
Pengawasan laporan keuangan (X2) Wahab (2002: 51)	pengawasan laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas	a. Efisiensi b. Penyimpangan anggaran c. Tanggungjawab d. Pengawasan laporan keuangan	8

	anggaran	akuntabilitas e. Pencapaian sasaran anggaran	
Akuntabilitas Kinerja (Y) (Kumurotomo 2005)	kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertngghungjawaban	a. Kejujuran b. Proses c. Program d. Kebijakan	8

I. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Provsu yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.61, Suka Damai, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20142 dan penelitian ini dilakukan pada bulan November 2019 s/d April 2019

TABEL III.1
Waktu Penelitian

KEGIATAN PENELITIAN	WAKTU PENELITIAN																			
	Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul		■																		
Pembuatan proposal				■	■															
Seminar Proposal						■														
Pengumpulan Data							■	■	■	■										
Penyusunan Skripsi											■	■	■	■						
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■		
Sidang Meja Hijau																			■	

J. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2007).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dalam lingkup Pemerintahan Kota Medan dengan jumlah pegawai BPKD sebanyak 32 yang terdiri atas

Tabel III.3
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Bidang Pengelola Keuangan	4
4	Bidang Penetapan	4
5	Bidang Pengelola aset	4
6	Bidang Unit Pelaksana	4
7	Bidang Penagihan dan Penertiban	4
8	Kelompok Jabatan Fungsional	10

Penelitian ini menggunakan teknik sampling probabilitas (probability) dimana merupakan teknik yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 32 responden, metode pemilihan sampel menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel hal tersebut dikarenakan bahwa jumlah populasi yang terlalu sedikit.

K. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui teknik pengambilan angket atau pengumpulan data penelitian dilaksanakan dari awal bulan Desember 2018 sampai dengan akhir bulan April 2019. Pengumpulan data menggunakan metode kuisioner yang didistribusikan oleh peneliti kepada responden secara langsung.

Setelah dilakukannya pengumpulan kuesioner maka dari hasil kuesioner maka diuji terlebih dahulu keabsahan kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan realibilitas sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian yang telah dibuat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur untuk menguji validitas data yang diperoleh digunakan *factor analysis* melalui *varimax rotation*. Item yang dimasukkan dalam analisis adalah item yang memiliki *factor loading* > 0,05 (Hair, 1998).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrumen akan diuji dengan menggunakan *Cronbach-Alpha coefficient*. Instrumen dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* >0,60 (Nunnaly, 1978).

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan software SPSS 15 dengan tahapan sebagai berikut:.

1. Statistik Deskriptif

Menurut Imam Ghozali (2006), statistic deskriptif dapat mendeskriptifkan

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Pengujian statistic deskriptif merupakan proses analisis yang merupakan proses menyeleksi data sehingga data yang akan dianalisis memiliki distribusi normal.

2. Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 16.0 *for Windows*. Untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4, dilakukan memprediksi variabel *multiple regression analysis* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

α	:	Konstanta
β	:	Besaran koefisien regresi dari masing - masing variabel
Y	:	Akuntabilitas kinerja
X1	:	Penerapan SAP
X2	:	Pengawasan laporan keuangan

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan terlebih dahulu harus memenuhi kriteria dalam uji asumsi klasik sebagai berikut :

- a) Uji Normalitas, untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
- b) Uji Multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Apabila variabel independen memiliki angka VIF di sekitar 1, dan nilai tolerance mendekati 1 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut tidak memiliki multikolinearitas dengan variabel

lain.

- c) Uji Heteroskedastisitas, menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Pengujian Secara Parsial

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas karakteristik manajemen dan penerapan standar akuntansi. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut

- 1). Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak ada pengaruh penerapan SAP, pengawasan laporan keuangan terhadap akuntabilitas.

H_a : ada pengaruh penerapan SAP, pengawasan laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.

- 2) Membandingkan hasil t_{sig} dengan nilai probabilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $t_{sig} > \alpha$ 0,05 berarti H_0 diterima dan H_a Ditolak

Jika $t_{sig} \leq \alpha$ 0,05 berarti H_0 ditolak. Dan H_a Diterima

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai t_{hitung}

r_{xy} = korelasi xy yang ditemukan

n = jumlah sampel

b. Pengujian Secara Simultan

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

1). Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak ada pengaruh pengaruh penerapan SAP, pengawasan laporan keuangan terhadap akuntabilitas manajerial.

H_a : ada pengaruh penerapan SAP, pengawasan laporan keuangan, terhadap akuntabilitas manajerial.

2). Membandingkan hasil F_{sig} dengan nilai probabilitas α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:

Jika $F_{sig} > \alpha$ 0,05 berarti H_0 diterima dan H_a ditolak
 Jika $F_{sig} \leq \alpha$ 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_a diterima

$$Fh = \frac{R^2 \int k}{(1 - r^2) \int (n - k - 1)}$$

(Sugiyono, 2006: 212)

Dimana :

R = Koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel bebas

N = sampel

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2012 : 277)

Keterangan:

D = Determinasi

R^2 = Nilai korelasi berganda

100% = Persentase Kontribusi

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada di bawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 tentang penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Karakteristik Responden

Dalam menyebarkan angket yang penulis lakukan terhadap 32 responden tentu memiliki perbedaan karakteristik baik itu secara usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Banyaknya pegawai yang bekerja di Dinas Perhubungan Sumatera Utara, oleh karena itu perlu adanya pengelompokan untuk masing-masing identitas pribadi para responden, berikut adalah bagian dari Dinas Perhubungan Sumatera Utara :

Tabel IV.1
Data Jumlah Responden Dishub Provsu

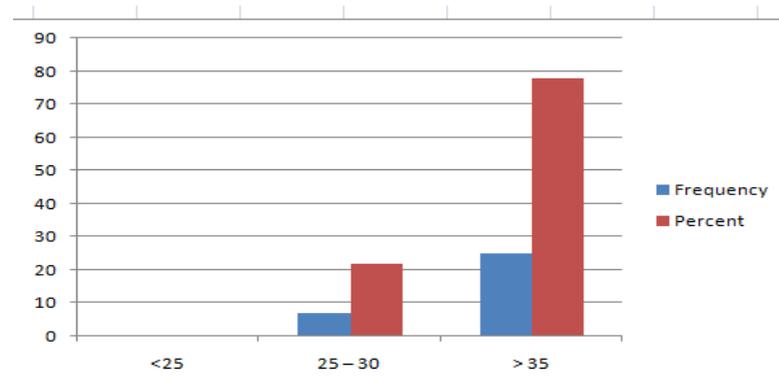
No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Bidang Pengelola Keuangan	4
4	Bidang Penetapan	4
5	Bidang Pengelola aset	4
6	Bidang Unit Pelaksana	4
7	Bidang Penagihan dan Penertiban	4
8	Kelompok Jabatan Fungsional	10

Data kuesioner yang disebarakan diperoleh beberapa karakteristik responden, yakni jenis usia, pendidikan dan pekerjaan. Tabel-tabel dibawah ini akan menjelaskan karakteristik responden penelitian

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent
<25	0	0	0
25 – 30	7	22.0	22.0
> 35	25	78.0	78.0
Total	32	100	100

Sumber data : SPSS

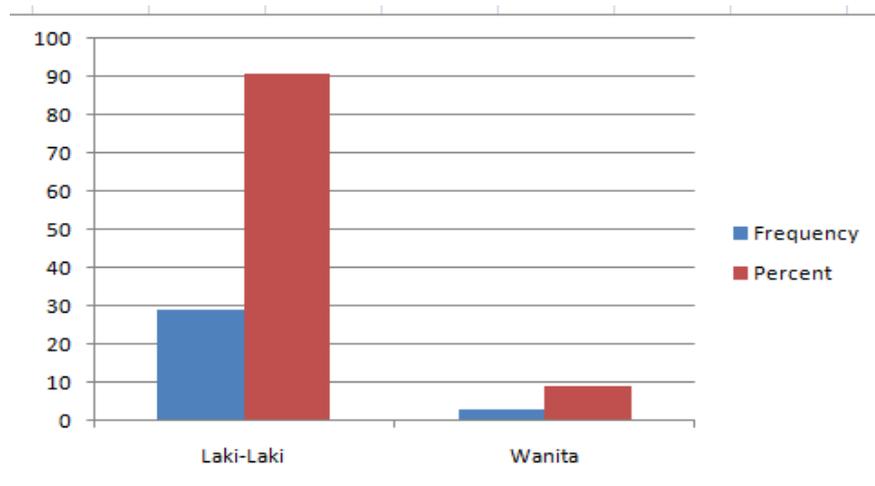


Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari berbagai karakteristik usia yang berbeda-beda dari yang muda sampai yang tua. Hal ini berarti pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara didominasi satu karakteristik usia yaitu usia >35 tahun (78%) dan yang paling sedikit pegawai yang berusia 25-30 tahun (22%).

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent
Laki-Laki	29	91.0	91.0
Wanita	3	9.0	9.0
Total	32	100.0	100.0

Sumber data : SPSS

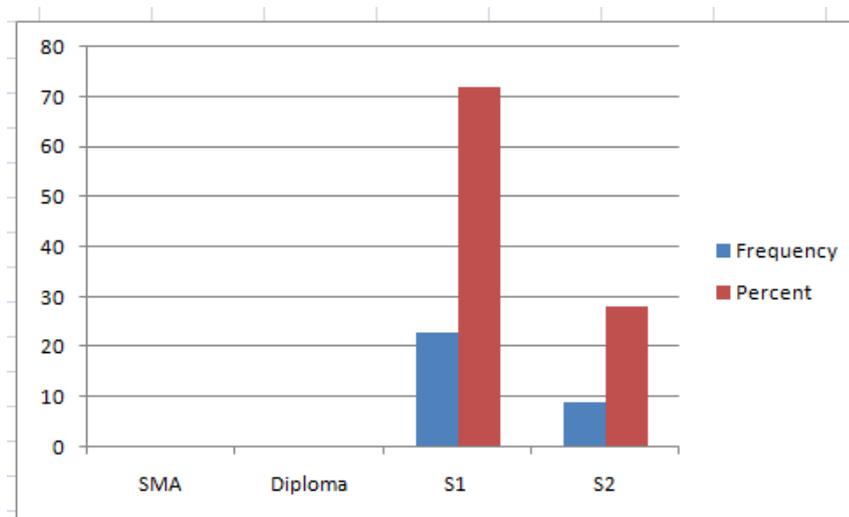


Dari tabel di atas diketahui bahwa responden penelitian ini terdiri wanita 3 orang (9%) dan laki-laki 29 orang (91%). Persentase pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan memiliki jumlah yang hampir sama banyaknya. Hal ini berarti karakteristik berdasarkan jenis kelamin pegawai didominasi jenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent
SMA	0	0	0
Diploma	0	0	0
S1	23	72.0	72.0
S2	9	28.0	28.0
Total	32	100.0	100.0

Sumber data : SPSS



Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah S1 yaitu sebanyak 23 orang (72%) dan S2 sebanyak 9 orang (28%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai lebih banyak berpendidikan S1. Dan pegawai memiliki karakteristik pendidikan tinggi.

3. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Variabel Penerapan standar akuntansi

Pada penelitian ini penulis menyebarkan angket kepada seluruh responden yang berjumlah 32 orang. Dimana responden dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Pada penelitian ini pula penulis menggunakan *questioner* sebagai alat untuk menganalisa data agar dapat

menghasilkan penelitian yang berguna

Tabel 4.4
Tabulasi Jawaban Responden Penerapan standar akuntansi

No	Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Penyusunan anggaran di instansi sangat besar	10	31	19	59	2	6	1	3	0	0	32	100
2	peran atasan saudara dalam menjelaskan adanya alasan tertentu untuk merevisi anggaran sangat besar	4	13	15	47	12	38	1	3	0	0	32	100
3	Kebutuhan anda untuk mendiskusikan masalah terkait anggaran kepada atasan anda sangat besar	4	13	13	41	8	25	5	16	2	6	32	100
4	pengaruh anda pada finalisasi anggaran sangat besar	1	3	16	50	10	31	5	16	0	0	32	100
5	kontribusi anda pada penyusunan anggaran sangat besar	5	16	12	38	13	41	2	6	0	0	32	100
6	Frekuensi diskusi terkait anggaran yang inisiatifnya berasal dari atasan anda sangat besar	12	38	16	50	4	13	0	0	0	0	32	100
7	Atasan saya sering meminta pendapat atau usulan saya dalam proses	10	31	19	59	2	6	1	3	0	0	32	100

	penyusunan anggaran													
8	Menurut saya, kontribusi saya cukup dalam penyusunan anggaran	4	13	15	47	12	38	1	3	0	0	32	100	

Sumber : Data diolah (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel penerapan standar akuntansi responden banyak yang menjawab setuju seperti pada pernyataan item 1 dan tujuh yang menyatakan bahwa setiap pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan standar akuntansi artinya setiap pegawai wajib ikut dalam menyusun anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Data terlampir). Berikut adalah penjelasan dari jawaban responden :

1. Jawaban responden tentang penyusunan anggaran di instansi sangat besar, responden menjawab setuju 59%
2. Jawaban responden tentang peran atasan saudara dalam menjelaskan adanya alasan tertentu untuk merevisi anggaran sangat besar, responden menjawab setuju 47%
3. Jawaban responden tentang Kebutuhan anda untuk mendiskusikan masalah terkait anggaran kepada atasan anda sangat besar responden menjawab setuju 41%
4. Jawaban responden tentang pengaruh anda pada finalisasi anggaran sangat besar, responden menjawab setuju 50%.
5. Jawaban responden tentang kontribusi anda pada penyusunan anggaran sangat besar, responden menjawab setuju 38%.

6. Jawaban responden tentang Frekuensi diskusi terkait anggaran yang inisiatifnya berasal dari atasan anda sangat besar, responden menjawab setuju 50%.
7. Jawaban responden tentang Atasan saya sering meminta pendapat atau usulan saya dalam proses penyusunan anggaran, responden menjawab setuju 59%.
8. Jawaban responden tentang Menurut saya, kontribusi saya cukup besar dalam penyusunan anggaran, responden menjawab setuju 47%.

b. Variabel Pengawasan kualitas laporan keuangan

Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab. Berikut adalah hasil jawaban responden mengenai Pengawasan kualitas laporan keuangan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 4.6
Tabulasi Jawaban Responden Pengawasan kualitas laporan keuangan

No	Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
		1	Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan	8	25	17	53	6	19	1	3	0	0
2	Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan	13	41	16	50	1	3	2	6	0	0	32	100

3	Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada SKPD yang mencapai target anggaran	7	22	22	69	1	3	2	6	0	0	32	100
4	Dengan anggaran yang ada, saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang saya harapkan	5	16	17	53	8	25	2	6	0	0	32	100
5	Dengan anggaran saya miliki, apa yang saya harapkan dapat tercapai	12	38	14	44	6	19	0	0	0	0	32	100
6	Saya sangat yakin dengan anggaran yang ada, saya dapat menyelesaikan tugas seperti yang saya harapkan	10	31	14	44	7	22	1	3	0	0	32	100
7	Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan	21	66	8	25	3	9	0	0	0	0	32	100
8	Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan	7	22	18	56	7	22	0	0	0	0	32	100
9	Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada SKPD	13	41	16	50	1	3	2	6	0	0	32	100

yang mencapai target anggaran																			
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Pengawasan kualitas laporan keuangan responden banyak yang menjawab setuju seperti pada item pernyataan nomor 2 dengan pernyataan Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya setiap realisasi anggaran yang digunakan maka harus sesuai dengan target yang sudah disusun agar dapat dievaluasi penggunaannya (Data terlampir). Berikut adalah penjelasan dari jawaban responden :

1. Jawaban responden tentang Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan., serta persepsi seseorang tentang tugas dan kewajibannya, responden menjawab setuju 53%
2. Jawaban responden tentang Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan., responden menjawab setuju 50%
3. Jawaban responden tentang Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada SKPD yang mencapai target anggaran responden menjawab setuju 69%
4. Jawaban responden tentang Dengan anggaran yang ada,saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang saya harapkan, responden menjawab setuju 53%.
5. Jawaban responden tentang dengan anggaran saya miliki, apa yang saya harapkan dapat tercapai, responden menjawab setuju 44%.

6. Jawaban responden tentang Saya sangat yakin dengan anggaran yang ada, saya dapat menyelesaikan tugas seperti yang saya harapkan, responden menjawab sangat setuju 44%.
7. Jawaban responden tentang Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan., responden menjawab sangat setuju 66%.
8. Jawaban responden tentang Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, responden menjawab setuju 56%.
9. Jawaban responden tentang Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada SKPD yang mencapai target anggaran, responden menjawab setuju 50%.

c. Variabel Akuntabilitas Kinerja

Tabel 4.7
Tabulasi Jawaban Responden Akuntabilitas Kinerja

No	Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan	1	3	23	72	8	25	0	0	0	0	32	100
2	Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin	6	19	23	72	3	9	0	0	0	0	32	100
3	Visi dan misi program perlu	4	13	24	75	4	13	0	0	0	0	32	100

	ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi												
4	Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program	1	3	23	72	8	25	0	0	0	0	32	100
5	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan	6	19	23	72	3	9	0	0	0	0	32	100
6	Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan	11	34	20	63	1	3	0	0	0	0	32	100
7	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program	0	0	23	72	9	28	0	0	0	0	32	100
8	Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikato kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan	10	31	14	44	7	22	1	3	0	0	32	100
9	Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat	13	41	16	50	1	3	2	6	0	0	32	100
10	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan	7	22	22	69	1	3	2	6	0	0	32	100

program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah sudah baik sehingga responden menjawab setuju dengan item pernyataan nomor 3 dengan pernyataan Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi hal ini menunjukkan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran disusun sesuai dengan visi misi BPKD agar terciptanya akuntabilitas pemerintahan (Data terlampir). Berikut adalah penjelasan dari jawaban responden :

1. Jawaban responden tentang Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan, serta persepsi seseorang tentang tugas dan kewajibannya, responden menjawab setuju 72%
2. Jawaban responden tentang Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin., responden menjawab setuju 72%
3. Jawaban responden tentang Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi responden menjawab setuju 75%
4. Jawaban responden tentang Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program, responden menjawab setuju 72%.
5. Jawaban responden tentang Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan, responden menjawab setuju 72%.

6. Jawaban responden tentang Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan, responden menjawab sangat setuju 63%.
7. Jawaban responden tentang Melakukan pengecekan terhadap jalannya program, responden menjawab sangat setuju 72%.
8. Jawaban responden tentang Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikato kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program, responden menjawab setuju 44%.
9. Jawaban responden tentang Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat, responden menjawab setuju 50%.
10. Jawaban responden tentang LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, responden menjawab setuju 69%.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas yang diukur dengan kejujuran, proses, program, dan kebijakan responden banyak yang menjawab setuju, hal ini menunjukkan akuntabilitas yang dilakukan Polrestabes sudah baik sehingga responden menjawab setuju Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi hal ini menunjukkan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran disusun sesuai dengan visi misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara agar terciptanya akuntabilitas (Data terlampir). Data dari

masing-masing variabel sistem pengendalian intern, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas dapat dilihat pada lampiran II.

4. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Statistik deskriptif ini meliputi beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi, deskriptif, eksplorasi data, tabulasi silang dan analisis rasio yang menggunakan Minimum, Maksimum, Mean, Median, Mode, Standard Deviasi.

Tabel IV.8
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
penerapan standar akuntansi	32	24,00	39,00	30,5313	3,61881
Pengawasan kualitas laporan keuangan	32	41,00	56,00	48,8438	3,86973
Akuntabilitas	32	34,00	46,00	40,1250	2,92652
Valid N (listwise)	32				

Penerapan standar akuntansi memiliki nilai minimum sebesar 24,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah nilai penerapan standar akuntansi dalam penelitian ini adalah 24,00. Penerapan standar akuntansi memiliki nilai maksimum sebesar 39,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai penerapan standar akuntansi dalam penelitian ini adalah 39,00. Penerapan standar akuntansi memiliki nilai rata-rata sebesar 30,5313 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penerapan standar akuntansi penelitian ini adalah 30,5313.

Pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum sebesar 41,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah nilai Pengawasan kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini adalah 41,00. Pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki nilai maksimum sebesar 56,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi nilai Pengawasan kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini

adalah 56,00. Pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki nilai rata-rata sebesar 48,8438 yang menunjukkan bahwa rata-rata jumlah Pengawasan kualitas laporan keuangan penelitian ini adalah 48,8438.

Akuntabilitas kinerja memiliki nilai minimum sebesar 34,00 yang menunjukkan bahwa jumlah terendah akuntabilitas dalam penelitian ini adalah 34,00. Akuntabilitas memiliki nilai maksimum sebesar 46,00 yang menunjukkan bahwa jumlah tertinggi akuntabilitas dalam penelitian ini adalah 46,00. Y (akuntabilitas) memiliki nilai mean sebesar 66,07 yang menunjukkan bahwa jumlah rata-rata dalam akuntabilitas dalam penelitian ini adalah 66,07.

5. Uji Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian yang telah dibuat dan disebarkan kepada 32 responden pada bagian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur untuk menguji validitas data yang diperoleh digunakan *factor analysis* melalui *varimax rotation*. Item yang dimasukkan dalam analisis adalah item yang memiliki *factor loading* $> 0,05$ (Hair, 1998).

Tabel IV.9
Uji Validitas X1

Pernyataan	Nilai Korelasi	R _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,358 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 2	0,499 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 3	0,694 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 4	0,660 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 5	0,785 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 6	0,752 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 7	0,573 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 8	0,573 (positif)	0,338	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 8 pernyataan mengenai penerapan standar laporan keuangan berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 8 pernyataan dinyatakan valid.

Tabel IV.10
Tabel Uji Validitas X2

Pernyataan	Nilai Korelasi	R _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,624 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 2	0,754 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 3	0,518 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 4	0,586 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 5	0,534 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 6	0,555 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 7	0,730 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 8	0,665 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 9	0,754 (positif)	0,338	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 9 pernyataan mengenai kualitas laporan keuangan berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 9 pernyataan dinyatakan valid.

Tabel IV.11
Tabel Uji Validitas Y

Pernyataan	Nilai Korelasi	R _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,491 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 2	0,844 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 3	0,781 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 4	0,491 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 5	0,844 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 6	0,530 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 7	0,558 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 8	0,592 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 9	0,556 (positif)	0,338	Valid
Pernyataan 10	0,502 (positif)	0,338	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 2019

Dari 10 pernyataan mengenai akuntabilitas kinerja berupa ketanggapan yang diajukan penulis kepada responden, 10 pernyataan dinyatakan valid

6. Uji Asumsi Klasik.

Menurut Ghozali (2013:100) Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), grafik Histogram, dan grafik Normal Plot. Uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Ghozali (2013:154) dalam uji Kormogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu:

- 1) jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal,
- 2) jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal.

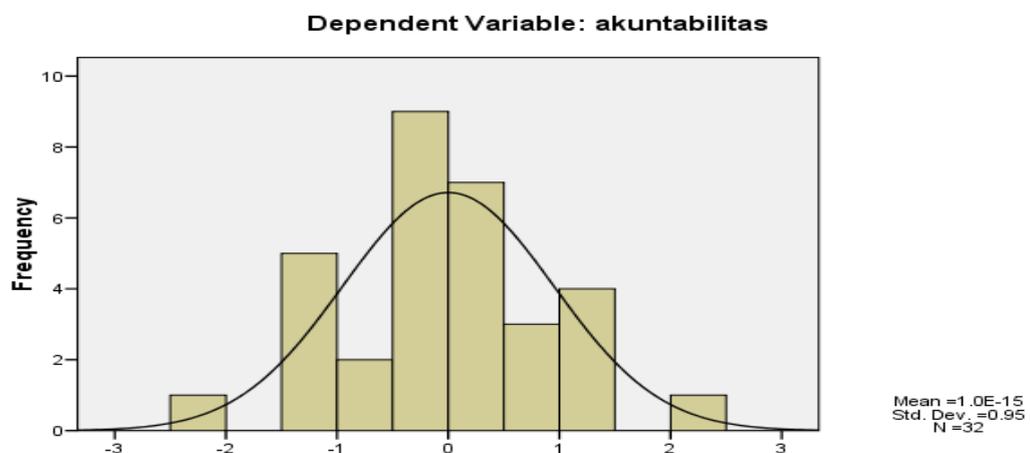
Hasil uji kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.12
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penerapan standar akuntansi	Pengawasan kualitas laporan keuangan	akuntabilitas
N		32	32	32
Normal Parameters(a,b)	Mean	30,5313	48,8438	40,1250
	Std. Deviation	3,61881	3,86973	2,92652
Most Extreme Differences	Absolute	,085	,101	,109
	Positive	,085	,058	,105
	Negative	-,083	-,101	-,109
Kolmogorov-Smirnov Z		,483	,572	,616
Asymp. Sig. (2-tailed)		,974	,899	,843

Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah penerapan standar akuntansi (X1) 0.974, Pengawasan kualitas laporan keuangan (X2) 0.899, akuntabilitas (Y) 0.722 maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena $p > 0,05$. Data yang terdistribusi secara normal tersebut.

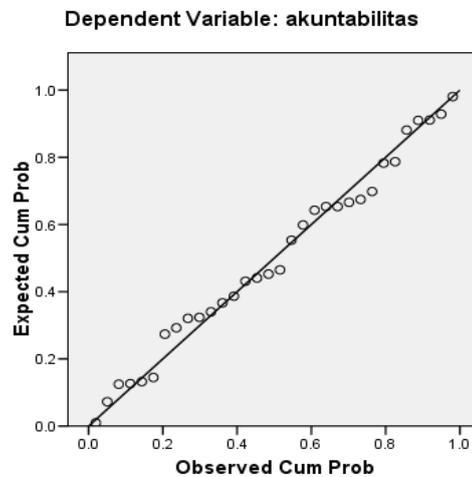
Histogram



Gambar 4.1
Histogram

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2
Grafik P-Plot

Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot dibawah ini. Pada grafik normal p-plot, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya agak mendekati dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

b. Multikolinearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independent. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolonearitas sehingga model regresi tidak dapat digunakan. Mendeteksi ada tidaknya gejala multikolonearitas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Besarnya tingkat multikolonearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu: $Tolerance > 0.10$, dan nilai $VIF < 5$ (Ghozali, 2013 : 103). Berikut ini disajikan tabel hasil pengujian multikolonearitas:

Tabel IV.13
Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,687	3,252		2,671	,012	
	Penerapan standar akuntansi	,216	,065	,267	4,332	,000	,903
	Pengawasan kualitas laporan keuangan	,859	,092	1,136	9,322	,000	,393

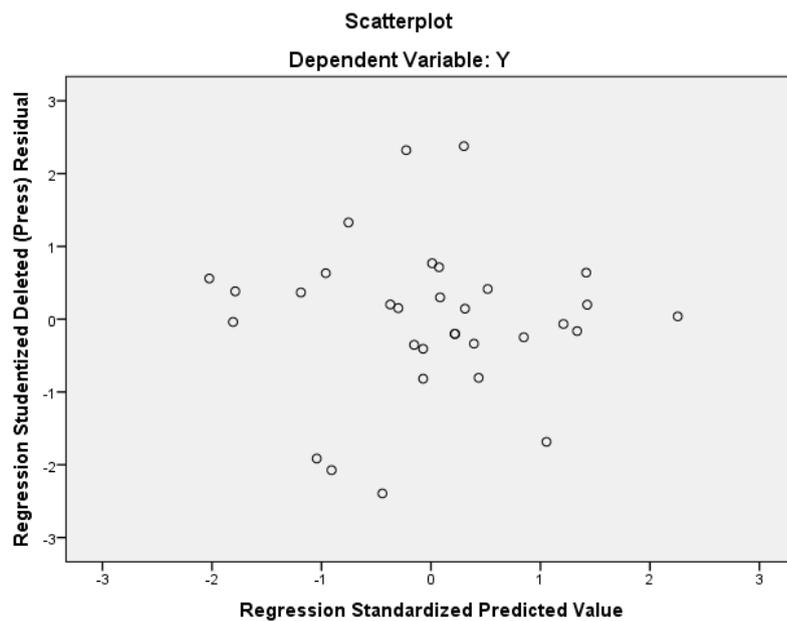
a Dependent Variable: akuntabilitas

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonearitas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel lebih besar dari 0,1.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, karena karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi (Ghozali, 2013:134). Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.3
Scaterplot

6. Analisis Regresi

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dan layak dilakukan analisis regresi. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Persamaan Regresi

Sugiyono (2013:298) Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linier, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, melalui pengaruh pengendalian internal, pengembangan mutu pegawai terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.14
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,687	3,252		2,671	,012
	Penerapan standar akuntansi	,216	,065	,267	4,332	,000
	Pengawasan kualitas laporan keuangan	,859	,092	1,136	9,322	,000

Berdasarkan tabel diatas didapatlah persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 8,687 + 0,216X_1 + 0,859X_2$$

Keterangan:

- 1) konstanta sebesar 8,687 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ($X_1 = 0, X_2 = 0$) maka nilai akuntabilitas sebesar 8,687.
- 2) β_1 sebesar 0,216 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 0,216 sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan akuntabilitas sebesar 0,216 dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) β_2 sebesar 0,859 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pengawasan kualitas laporan keuangan sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan akuntabilitas sebesar 0,859 dengan asumsi variabel lain tetap.

7. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Dengan criteria sebagai berikut :

- 1) Bila $Sig > 0.05$, maka $H_0 =$ diterima, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 2) Bila $sig < 0.05$, maka $H_0 =$ ditolak, sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat

- 3) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka $H_0 =$ ditolak sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat
- 4) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka $H_0 =$ diterima sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat

Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari :

1. Penerapan standar akuntansi

Hipotesis : penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas

$$t_{hitung} > t_{tabel} (4,332 > 1,699)$$

$$\text{Nilai signifikansi } 0,000 < 0,05$$

Maka H_0 ditolak sehingga penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas

2. Pengawasan kualitas laporan keuangan

Hipotesis : Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas

$$t_{hitung} > t_{tabel} (9,332 > 1,699)$$

$$\text{Nilai signifikansi } 0,000 < 0,05$$

Maka H_0 ditolak sehingga Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas

b. Uji F

Untuk melihat pengaruh penerapan standar akuntansi, Pengawasan kualitas laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas secara simultan dapat dihitung dengan menggunakan *F test*. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 18, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel IV.15
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	222,141	3	74,047	47,817	,000(a)
	Residual	43,359	28	1,549		
	Total	265,500	31			

a Predictors: (Constant), kejelasan, Penerapan standar akuntansi, Pengawasan kualitas laporan keuangan

b Dependent Variable: akuntabilitas

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh F_{hitung} sebesar 47.817 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan F_{tabel} sebesar 2,99 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi, Pengawasan kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($47,817 > 2,99$) dan signifikansi penelitian $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$).

c. Koefien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (*R*) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai *R* berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *R Square* adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai *R Square* semakin mendekati 1, maka variabel-variabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *R Square* maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai *R Square* memiliki kelemahan yaitu nilai *R Square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen.

Tabel IV.16
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915 ^a	.837	.819	1.24441

Adjusted R Square adalah berfungsi untuk mengukur seberapa besar tingkat keyakinan penambahan variabel independen yang tepat untuk menambah daya prediksi model. Dari hasil penelitian nilai adjust R Square sebesar 0,819 berarti 81,9% penerapan standar akuntansi, Pengawasan kualitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas sementara sisanya 13.1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan standar akuntansi Terhadap Akuntabilitas

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t_{hitung} untuk variabel penerapan standar akuntansi sebesar 4,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,332 > 1,699$), maka penerapan standar akuntansi menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Berdasarkan hasil jawaban responden setiap pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan standar akuntansi artinya setiap pegawai wajib ikut dalam menyusun anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, namun dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Dinas Perhubungan Provsu tahun 2015-2017 bahwa opini yang diberikan berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hal tersebut

menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas kualitas laporan keuangan Dinas Perhubungan Sumatera Utara, sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berupa prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia

Pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta akuntabilitas pemerintah yang lebih baik.

Dengan adanya penerapan standar akuntansi dapat memungkinkan manajemen puncak untuk memahami masalah yang dihadapi oleh karyawan dan karyawan juga lebih dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh manajemen puncak. Sehingga anggaran partisipatif dapat meningkatkan komitmen para karyawan untuk mencapai tujuan anggaran.

Dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis akuntabilitas diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam

proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta akuntabilitas pemerintah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dengan judul Pengaruh Penerapan standar akuntansi terhadap Akuntabilitas Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan yang positif dan signifikan.

2. Pengaruh Pengawasan kualitas laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas

Pengawasan kualitas laporan keuangan memiliki t_{hitung} sebesar 9,332 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,332 > 1,699$), maka Pengawasan kualitas laporan keuangan secara individual mempengaruhi akuntabilitas. Signifikansi penelitian juga menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Pengawasan kualitas laporan keuangan responden banyak yang menjawab setuju seperti pada item pernyataan nomor 2 dengan pernyataan Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya setiap realisasi anggaran yang digunakan maka harus

sesuai dengan target yang sudah disusun agar dapat dievaluasi penggunaannya.

Namun kenyataannya peningkatan persentase realisasi anggaran belanja dari tahun 2015-2017 yang artinya penggunaan anggaran belanja yang tidak efisien penggunaannya serta tidak maksimalnya peranan pengawasan dalam mekanisme pengendalian atas proses operasional.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pentingnya aspek Pengawasan kualitas laporan keuangan diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh pimpinan. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pimpinan agar dapat meningkatkan akuntabilitas.

Pengawasan kualitas laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen (Kenis, 2009). Pentingnya aspek Pengawasan kualitas laporan keuangan diterapkan dalam rangka untuk melakukan prospektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola

oleh aparat pemerintah. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pemerintah.

Tujuan dilakukannya Pengawasan kualitas laporan keuangan adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya akuntabilitas dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan akuntabilitasnya di masa yang akan datang, sehingga dengan adanya Pengawasan kualitas laporan keuangan yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

3. Pengaruh Penerapan standar akuntansi, Pengawasan kualitas laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas

Dari uji ANOVA atau *F test*, diperoleh F_{hitung} sebesar 47.817 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan F_{tabel} sebesar 2,99 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi, Pengawasan kualitas laporan keuangan dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($47,817 > 2,99$) dan signifikansi penelitian $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$).

Penyusunan anggaran berbasis akuntabilitas bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis akuntabilitas tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Selain itu, anggaran berbasis akuntabilitas memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan akuntabilitas organisasi yang berpedoman pada prinsip *value for money*.

Penerapan ABK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidak ringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang lebih berat adalah mengubah *mind set* tidak hanya pada lingkungan Pemerintah (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. *Mind set* DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi *output base*, tidak lagi *input base*.

Penyusunan Rancangan APBD di Dinas Perhubungan Kota Medan dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan dituangkan dalam nota kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Kepala daerah dan DPRD, setelah itu dilakukannya Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, setelah adanya surat edaran ini setiap SKPD membuat RKA-SKPD atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun bersangkutan. Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Slamet (2005:6) menyatakan: Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab IV maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan / pertanggungjawaban, dan evaluasi sehingga akan tercipta akuntabilitas pemerintah yang lebih baik.
2. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas. Tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen.
3. Penerapan standar akuntansi, Pengawasan kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara pemerintahan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

B. Saran

Dari hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang akan diberikan kepada instansi pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Dalam membuat perencanaan anggaran Dinas Perhubungan Kota Medan sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam implementasi atau pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan Kota Medan sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan seberapa jauh pelaksanaannya dan memperbaiki sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan menambah variabel – variabel lain seperti kemampuan pengorganisasian, kemampuan kepemimpinan, kemampuan pengendalian yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul Wahab Solichin. (2002). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agus Dwiyanto. (2005) *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahyari Ginting. (2009). *Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta. BPF E.
- Anthony, R. N. dan Govindarajan. (2003) *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit Salemba Empat Edisi:1 Buku 2.
- Apandi Nasehatun. (2004). *Budget and Control*. Jakarta : Grasindo.
- Ari Dwipayana. (2003). *Membangun Good Governance Di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Arifin. (2007). *Teori keuangan dan Pasar modal*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Ausaid (2001) *Intelektual Property Rights*. Asian Law Group
- Gunawan Adisaputro, dan Marwan Asri, (2003). *Anggaran Perusahaan*, Buku 1, Penerbit BPF E, Yogyakarta.
- Hansen & Mowen. (2004). *Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia*. Buku Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Imam Ghazali, (2001), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Undip.
- Ismail Solihin. (2009). *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta : Salemba Empat
- John Ivancevich, , (2003), *Effects of Goal Setting on Performance and Job Satisfaction, Journal of Applied Psychology*
- Kennis,I (2011)” *Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance*”. *The Accounting Review*: 707-721
- Kisdarto Atmosoeparto, 2005. *Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa*

Transisi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar

Locke, E.A., (2009), *Toward a Theory of Task Motivation and Incentives,*”
Organizational Behavior and Human Performance, pp. 157-189.

Mangkuprawira, (2004), *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Penerbit
Ghalia Indonesia, Jakarta

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta

Mayuraa (2014) *Pengaruh Kejelasan Dan Tujuan Anggaran Terhadap
Akuntabilitas Aparat Pemerintah Gorontalo*

Muhammad Yusuf (2015) *Prosedur Penyusunan Anggaran Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara*

Mulyadi, (2001), *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat

Nafarin,M (2007) *Penganggaran Perusahaan*.Jakarta:Salemba Empat

Nazaruddin (2008) *Penyusunan Anggaran Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Noviana. (2015). *Prosedur Penyusunan Anggaran Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera Utara*

Rahma Kurnia, (2004), *Laporan Kegiatan Kursus identifikasi Dampak
Lingkungan*, Jogjakarta, GEGAMA.

S Pamudji. (2006), *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah
Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara*, Jakarta: Institut Ilmu
Pemerintahan.

Salim Abbas. (2007). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta. PT Raja Grafindo
Persada.

Siegel G, and Marconi, H.R. (2003). *Behavioral Accounting*. South Western
Publishing Co.

Slamet Suyanto. (2005). *Dasar-dasar Pendidikan Akuntansi Sektor Publik*.
Yogyakarta: Hikayat Publishing.

Stephen P Robbins. dan Mary Coulter, (2004). “*Manajemen*”. Edisi ketujuh,
diterjemahkan oleh T. Hermaya dan Harry Slamet, Jakarta: Indeks

Supriyono. (2000). *Akuntansi Biaya*. Edisi 2. Yogyakarta : BPF.

T. Hani Handoko. (2003). *Manajemen*. Cetakan Kedelapan belas.
BPFYogyakarta, Yogyakarta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia

Veithzal Rivai, dan Mohd Ahmad Fawzi Basri, (2005). *Performance Appraisal*. Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI :

Nama : Widiya
Tempat / Tanggal Lahir : Batu Ajo 03 Desember 1996
Alamat : Jln seimencirim gg buntu 2
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Anak ke : 4 dari 5 Bersaudara
Agama : Islam
No Telepon : 0822 7760 5974
Nama Ayah : Yusuf
Alamat : Dusun Beringin jaya Batu Ajo
Nama Ibu : Sukesih
Alamat : Dusun Beringin jaya Batu Ajo

II. RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD NEGERI No. 118258 Batu Ajo 3, Lulus Tahun 2009
2. SMP SWASTA PRIMBANA MEDAN, Lulus Tahun 2012
3. SMK PANCA BUDI 2 MEDAN, Lulus Tahun 2015
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Hormat Saya

Widiya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : WIDIYA
N.P.M : 1505170700
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Proposal : PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
8-12-18.	- Latar belakang penelitian diperbaiki - fenomena masalah diperjelas. - Penambahan penelitian terdahulu - Perbaiki kerangka berpikir / konseptual - perbaiki HIPOTESIS		
28-12-18.	- Perbaiki latar belakang masalah - perkuat identifikasi masalah		
18-01-19	- perbaiki penulisan Bab III		
25/2/19	Ace, seminar proposal		

Pembimbing Proposal

Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si

Medan, Januari 2019
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : **WIDIYA**
 NPM : **1505170700**
 Konsentrasi : **Keuangan**
 Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Pajak/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)**
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merckayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 22-03-2019

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.